

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Desember 2014, *Energy Transfer Partners* (ETP), sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang energi dan gas alam mengajukan proposal pembangunan pipa minyak bawah tanah yang disebut dengan *Dakota Access Pipeline* (DAPL) kepada pemerintah federal Amerika Serikat. Pipa tersebut membentang melintasi empat negara bagian dari Dakota Utara hingga Illinois. Dengan menggunakan energi termutakhir, DAPL disebut menjadi pipa teraman untuk mengalirkan setengah juta barel minyak per hari dari tambang minyak Bakken di Dakota Utara menuju kilang minyak di kawasan Patoka, Illinois dan berlanjut hingga teluk Texas. Berdasarkan rencana awal, pembangunan DAPL ditargetkan rampung pada awal Januari 2017. Sedang dari segi dana, DAPL memakan biaya sebesar US\$ 3.8 milyar yang disokong oleh berbagai institusi keuangan baik dari dalam maupun luar negeri. (DiChristopher, 2017).

Dakota Access Pipeline (DAPL) merupakan pipa minyak milik *Dakota Access LLC*, perusahaan perseroan terbatas yang berinduk pada *Energy Transfer Partners* (ETP). Meski demikian, saham dalam *Dakota Access LLC* juga dimiliki oleh Philips 66 dan Sunoco Logistic Partners (BankTrack, 2017). DAPL membentang sejauh 1.172 mil atau sekitar 1.900 km dari sebuah ladang minyak dan yang disebut sebagai formasi Bakken, di Stanley, negara bagian Dakota Utara, melewati dua negara bagian lain, yakni Dakota Selatan dan Iowa sebelum akhirnya bermuara pada kilang minyak di kawasan Patoka, negara bagian Illinois (Aisch & Lai, 2017). Dari Illinois, DAPL akan terhubung dengan jalur pipa lama yang akan membawa minyak dari Stanley menuju teluk Texas (Ablow, 2016). DAPL sendiri dirancang untuk dapat mengirimkan minyak mentah dengan kapasitas 450.000

hingga 570.000 barel per hari. Mengutip dokumen milik *Dakota Access LLC*, pipa DAPL berdiameter 30 inci yang akan ditanam dengan kedalaman minimal 36 inci di bawah permukaan tanah. DAPL juga, setidaknya, berada pada kedalaman 48 inci pada lahan pertanian dan 24 inci pada susunan batuan padat. Sedang pada lahan privat pihak DAPL mengklaim adanya rancangan baru untuk meminimalisir kemungkinan kerusakan tanah (Dakota Access, LLC, 2016).

Setelah diajukan kepada pemerintah federal, pengkajian kelayakan pembangunan pipa kemudian dilakukan oleh *United States Army Corps of Engineer (USACE)*, sebuah badan yang memiliki wewenang untuk memberikan perizinan terkait keamanan konstruksi proyek pembangunan di Amerika Serikat. Di sisi lain, *informational hearing* kepada pemilik lahan juga dilakukan secara bertahap oleh pihak *Energy Transfer Partners (ETP)* sejak Agustus 2014 hingga Januari 2015 di beberapa wilayah terdampak pembangunan (BankTrack, 2017). Pengkajian dari Korps Insinyur Amerika Serikat berakhir dengan statemen terbuka pada Juli 2016 yang berisi persetujuan pembangunan *Dakota Access Pipeline (DAPL)*, sedang perizinan pembangunan dari badan pengawas masing-masing negara bagian telah lebih dulu dikantongi oleh DAPL yakni pada permulaan tahun 2016 (Midwest Alliance for Infrastructure Now, 2016). Keputusan USACE juga menjadi keputusan krusial karena melegalkan konstruksi pipa pada lebih dari 200 aliran air di kawasan terdampak (US Army Corps of Engineers, 2016). Perizinan USACE, bagaimanapun, disambut baik oleh pihak perusahaan dengan menyebut bahwa keputusan tersebut akan menguntungkan Amerika Serikat baik dari segi finansial maupun pengembangan energi kedepannya. Perizinan tersebut juga disambut baik oleh *Midwest Alliance for Infrastructure Now (MAIN)*, aliansi pebisnis lokal, serikat buruh dan tani, serta pemangku kepentingan pembangunan ekonomi lokal. Ed Wiederstein, ketua aliansi MAIN dan kelompok tani di Iowa menyebutkan DAPL akan memberikan keuntungan tak terhingga bagi keamanan dan ekonomi

Amerika Serikat kedepannya (Midwest Alliance for Infrastructure Now, 2016).

Dari segi dana, proyek *Dakota Access Pipeline* (DAPL) memakan dana sebesar US\$ 3.8 milyar yang, meskipun merupakan pipa minyak yang beroperasi dalam skala domestik, mendapatkan dukungan finansial dari berbagai institusi ekonomi global. Keseluruhan pinjaman dari bank-bank pendana DAPL kepada *Energy Transfer Partners* (ETP) mencapai US\$3.75 miliar, sedangkan di sisi lain, kredit sebesar US\$ 2.5 miliar disokong oleh belasan bank yang berbeda (Democracy Now, 2016). Bank dan institusi finansial tersebut turut mendanai proyek DAPL baik secara langsung, yakni menjadi investor dari proyek maupun tidak langsung melalui saham yang dimiliki dari perusahaan-perusahaan yang menjalankan proyek pipa (Miles, 2016).

Diantara bank-bank yang mendanai proyek DAPL adalah Wells Fargo, SunTrust, serta Citibank, dengan kantor perusahaan di Amerika Serikat; BNP Paribas, Credit Agricole, Natixis, Societe General, yang berkantor pusat di Perancis; SMBC Nikko Securities, Mizuho Bank, serta The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ asal Jepang; TD Securities yang bermarkas di Kanada; Intesa San Paolo dari Italia; ING Bank dengan kantor pusat di Amsterdam, Belanda; BayernLB asal Jerman; BBVA Securities, bank asal Spanyol; ICBC London, berkantor pusat di Inggris; serta DNB Capital, anak perusahaan finansial dari DNB ASA yang berkantor pusat di Norwegia. Terdapat pula institusi finansial yang menawarkan kredit kepada perusahaan induk dari DAPL, diantaranya Royal Bank of Scotland, HSBC Bank (Inggris), Bank of Nova Scotia, Royal Bank of Canada (Kanada), ABN Amro Capital (Belanda), U.S Bank, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs (Amerika Serikat), Deutsche Bank (Jerman), Credit Suisse, UBS (Swiss), DNB ASA (Norwegia), serta Sumimoto Mitsui Bank (Jepang) (Emily Fuller, 2017).

Pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL), seperti yang diklaim oleh *Dakota Access LLC*, akan mampu mempercepat terciptanya independensi energi disamping penyerapan tenaga kerja (*Dakota Access, LLC, 2016*). DAPL akan menciptakan sekitar 8.000 hingga 12.000 pekerjaan konstruksi lokal, menyuntikkan dana sebesar US\$156 juta ke dalam pajak penjualan dan pendapatan ke dalam ekonomi Amerika Serikat, juga menghasilkan US\$55 juta dalam pajak properti di North Dakota, South Dakota, Iowa serta Illinois (*Mahboob & Hahn, 2016*). Pendukung DAPL juga mengatakan adanya kemungkinan biaya energi yang lebih rendah. Dari segi keamanan lingkungan, DAPL disebut sebagai pipa yang sangat aman bagi pengiriman minyak di Amerika Serikat dengan pengawasan penuh 24 jam perhari, 7 hari dalam seminggu (*Sampathkumar, 2017*). Berdasarkan laman *Dakota Access Pipeline Facts*, pipa milik *Dakota Access LLC* juga dibuat melebihi syarat minimum yang ditetapkan oleh Departemen Transportasi Amerika Serikat. Gubernur Dakota Utara, Doug Burgum bahkan mendukung penuh pembangunan DAPL dengan mengatakan bahwa konstruksi pipa tersebut menjadi kunci utama yang akan membawa lonjakan produksi minyak lokal dari Dakota Utara ke pasaran yang lebih luas (*Energy Transfer LP, 2017*).

Energy Transfer Partners (ETP) menyebutkan bahwa pipa menjadi instrumen paling aman untuk mengirimkan minyak mentah lintas Amerika karena berada dibawah pengawasan ketat Departemen Transportasi Amerika Serikat termasuk dalam hal keamanan dan ketahanan pipa. Penggunaan pipa, sebut ETP, juga turut menguntungkan petani domestik karena dua transportasi konvensional yang sebelumnya digunakan untuk mengangkut minyak, truk dan kereta, akan dapat mengangkut lebih banyak hasil bumi ke pasaran (*Petroski, 2016*). Di sisi lain, *Dakota Access LLC* mengutip bagaimana pembangunan pipa di Dakota Utara pada era sebelumnya turut meningkatkan peningkatan yang

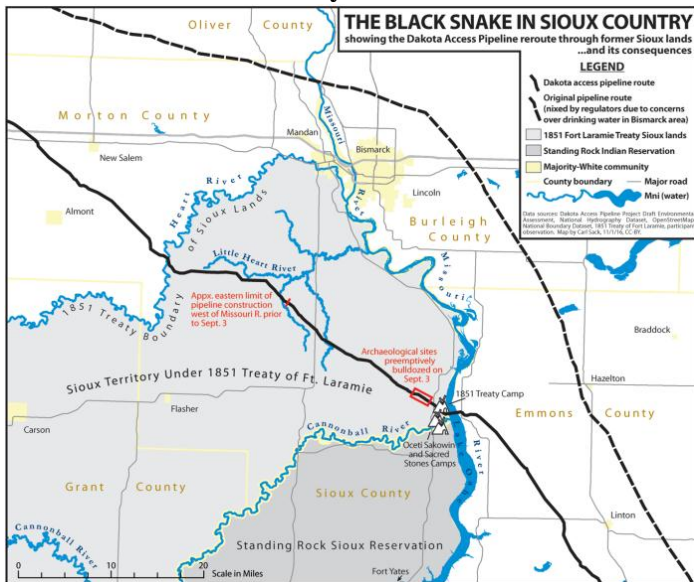
signifikan dalam produksi minyak mentah domestik (Dakota Access, LLC, 2014).

Pada kuartier akhir tahun 2016 pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL) telah mencapai lebih dari 70% keseluruhan konstruksi, kecuali pada bagian pipa yang akan ditanam di bawah badan danau Oahe dan berjarak setengah mil dari reservasi masyarakat adat Standing Rock yang menolak pembangunan pipa di kawasan tersebut (Eric Wolff, 2016). Penolakan tersebut didasari atas protes terhadap *reroute* pipa yang dianggap merugikan masyarakat adat. Pada mulanya, rute DAPL untuk menyeberangi sungai Missouri bukan berlokasi di danau Oahe, melainkan di Bismarck, ibu kota negara bagian Dakota Utara (Dakota Access, LLC, 2014). Namun demikian masyarakat setempat menolak rancangan rute tersebut karena kekhawatiran kontaminasi sumber air dan dampaknya bagi masyarakat. Hal ini berujung pada *reroute* DAPL ke arah selatan, berlokasi setengah mil dari reservasi Standing Rock, tepatnya di bawah danau Oahe (Thorbecke C. , 2016). Pihak DAPL mengatakan *reroute* dilakukan karena rute akan menjadi lebih pendek sehingga memakan biaya lebih sedikit. Masyarakat adat, tulis *New York Times*, menyuarakan penolakan yang sama karena Missouri menjadi sumber air minum utama Standing Rock (Aisch & Lai, 2017).

Di sisi lain, rute *Dakota Access Pipeline* (DAPL) yang berada di kawasan danau Oahe melewati beberapa titik vital seperti bawah aliran sungai Missouri pada kawasan danau Oahe sendiri, juga tanah sengketa yang menurut masyarakat adat tidak pernah diserahkan secara resmi kepada pemerintah federal. Danau Oahe yang dilintasi pipa DAPL merupakan satu-satunya sumber air minum bagi masyarakat adat setempat sehingga terdapat kekhawatiran akan kemungkinan kontaminasi sumber air. Sedang tanah tanah sengketa yang dilintasi pipa diklaim masyarakat Standing Rock sebagai tanah yang dikeramatkan karena jasad para leluhur suku Sioux disemayamkan di wilayah tersebut. Warga Sioux merupakan penduduk asli yang telah mendiami kawasan North Dakota

jauh sebelum masyarakat kulit putih datang dan membangun industri di kawasan tersebut (Young, 2017). Kasus ini kemudian menjadi perhatian internasional dengan dukungan yang terus mengalir kepada warga Standing Rock terutama dari kelompok aktivis lingkungan dan HAM (Wehelie, 2016).

Gambar 1.1 Peta reroute pipa DAPL dan tanah sengketa milik masyarakat adat.



Sumber: Tribal Business Journal (Ladue, 2017)

Perlawanan dari masyarakat adat ditandai dengan “protes damai” oleh beberapa tetua suku adat dengan mendirikan kamp-kamp di sekitar area pembangunan DAPL, yakni pertemuan antara sungai Cannonball dan sungai Missouri pada April 2016 (Humes, 2018). Protes di kamp *Sacred Stone*, nama kamp tersebut, kemudian berubah menjadi gelombang protes yang sangat besar dan melibatkan berbagai komponen masyarakat yang datang dari seluruh penjuru

Amerika. Angka pemrotes, seperti yang dituliskan *your news leader*, bahkan mencapai ribuan pada akhir musim panas tahun 2016. Pemrotes terdiri dari individu dengan berbagai latar belakang, puluhan organisasi non-pemerintah, asosiasi, serta publik figur Amerika Serikat (Naylor, 2018).

Klaim yang diajukan masyarakat adat adalah pelanggaran terhadap *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yakni hak masyarakat adat untuk turut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan suku adat, baik melalui konsultasi maupun negosiasi. Dalam kasus DAPL, masyarakat adat mengungkapkan tidak adanya konsultasi yang memadai dari pihak korporasi terhadap masyarakat adat terdampak. Di sisi lain, David Archambault II, ketua dari masyarakat adat Standing Rock menyebutkan bahwa meskipun pipa tidak secara langsung bersinggungan dengan reservasi masyarakat adat, rute *Dakota Access Pipeline* (DAPL) melintasi teritori masyarakat Sioux yang tidak pernah secara resmi diserahkan kepada pemerintah federal berdasarkan perjanjian *Fort Laramie* tahun 1851 (Whyte, 2017).

Perlawanan juga disuarakan oleh aktivis lingkungan dan organisasi non-pemerintah yang mengatakan bahwa pembangunan pipa di aliran danau Oahe akan memberikan ancaman bagi masyarakat adat yang mengandalkan sumber air minum dari kawasan danau. Perubahan iklim juga menjadi isu yang diangkat dengan menyebut pembangunan pipa sebagai “langkah mundur” saat negara lain bergerak maju melawan masalah tersebut. Organisasi akar rumput seperti Greenpeace, Earthjustice, dan Rainforest Action Network (RAN) secara langsung turun ke lapangan dan turut melakukan demonstrasi (Knight, 2016). Badan-badan tersebut juga mengirim surat kepada *United States Army Corps of Engineer* (USACE) dan institusi-institusi keuangan pendana proyek untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terkait pembangunan pipa. Solidaritas terhadap nasib masyarakat adat terlihat dari maraknya tagar #NoDAPL #WaterIsLife #DivestDAPL dan

#StandwithStandingRock yang sempat menjadi *trending topic* pada saat proses pembangunan berlangsung (Knight, 2016).

Gelombang protes yang berkepanjangan pada akhirnya memaksa Obama sebagai Presiden terpilih pada masa tersebut mengeluarkan keputusan presiden untuk menghentikan sementara proses pembangunan pipa (National Public Radio, Inc., 2016) (Democracy Now, 2016). Obama menginstruksikan kepada *United States Army Corps of Engineer* (USACE) untuk mencari kemungkinan rute lain yang lebih aman. Pada pertengahan November 2014 USACE mengeluarkan statemen resmi bahwa pihaknya memutuskan untuk melakukan pengkajian lebih dalam terkait pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL), sehubungan dengan sejarah yang dimiliki masyarakat adat atas teritori tersebut, pentingnya danau Oahe bagi masyarakat Standing Rock, juga hubungan antara pemerintah federal dengan kelompok adat (Kenny, Krieg, Sinder, & Blau, 2016).

Menganggapi keputusan Obama, baik pihak korporasi maupun pendukung DAPL menyebut bahwa tindakan tersebut hanya akan penghambat proses pembangunan dengan mengorbankan jutaan dolar terbuang sia-sia setiap minggunya. Pendukung pipa juga menyebut tindakan Obama sebagai keputusan yang *lawless*, senada dengan statemen dari Craig Stevens, juru bicara aliansi MAIN.

“President Obama’s decision not to issue the final easement is a rejection of the entire regulatory and judicial system, as well as the scores of Army Corps of Engineers and civil servants who toiled for more than 800 days to ensure the process was followed correctly, in accordance with the law.” (Eric Wolff, 2016).

Meskipun demikian, keputusan pada Era Obama tidak berlangsung lama. Tepat empat hari setelah menduduki kursi kepresidenan Trump mengeluarkan *executive order* yang menginstruksikan agar pembangunan Keystone XL, pipa

minyak lintas negara yang mengalirkan minyak mentah dari Kanada menuju Teluk Meksiko dan *Dakota Access Pipeline* (DAPL) kembali dilanjutkan (Baker & Davenport, 2017). Sebelumnya, konstruksi Keystone XL yang menghubungkan Alberta dengan teluk Texas dihentikan pada tahun 2015 setelah pembangunan dianggap tidak memenuhi kepentingan publik Amerika Serikat (Smith & Kassam, 2017). Terkait DAPL, Trump juga menginstruksikan kepada *United States Army Corps of Engineer*(USACE) untuk mempercepat proses analisa lapangan terkait kemungkinan perubahan rute pipa (Eilperin & Dennis, 2017). *Executive Order* tersebut, tulis *Washington Post*, sejalan dengan statemen Trump saat kampanye kepresidenan bahwa Amerika Serikat perlu meningkatkan produksi energi domestik dan membangun konstruksi pipa-pipa minyak untuk menyalurkan minyak mentah ke pasaran (Eilperin & Dennis, 2017).

Dalam statemennya terkait instruksi kelanjutan pembangunan pipa pada 24 Januari 2017 Trump menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh konstruksi pipa di Amerika Serikat. Pembangunan pipa, menurutnya, merupakan sebuah kebutuhan yang akan turut menguntungkan banyak pihak, membawa hasil produksi energi domestik Amerika Serikat ke pasaran yang lebih luas serta mempercepat terciptanya independensi produksi energi domestik. Trump juga menyebut bahwa konstruksi pipa sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat (Meyer, 2017). Sedang keputusan final dari pemerintah untuk menyelesaikan proyek pembangunan dirilis pada Februari 2016 (Business & Human Rights Resource Center, 2017).

“We are – and I am – very insistent that if we’re going to build pipelines in the United States...we want to build the pipe. It’s going to put a lot of workers, a lot of steelworkers back to work. OK. We will build our own pipeline, we will build our own pipes. That’s what it has to do with. Like we used to do in the old days.” (Smith & Kassam, 2017).

Keputusan Trump untuk melanjutkan pembangunan yang sempat terhenti sebut Sean Spicer, sekretaris pers Gedung Putih, merupakan awal dari “revolusi energi” di Amerika Serikat dengan tetap menjadikan lingkungan sebagai prioritas. Keputusan tersebut juga didukung oleh banyak pihak, termasuk Midwest Alliance for Infrastructure Now (MAIN), *Republican*, Gubernur terpilih Dakota Utara, juga Dewan Pembangunan dan Konstruksi Negara Bagian Iowa (Energy Transfer LP, 2017).

Mayoritas institusi finansial pendana *Dakota Access Pipeline* (DAPL), terlepas dari klaim dan tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat adat dan aktivis lingkungan tetap memilih untuk mendanai proyek konstruksi tersebut. Citigroup sebagai salah satu investor yang memiliki peran signifikan dalam pembangunan DAPL memilih untuk melanjutkan pendanaan (Herrera, 2016). Hal serupa dilakukan oleh Wells Fargo yang melalui CEO-nya Tim Sloan, mengatakan bahwa pihaknya akan tetap mendanai DAPL.

“As a company committed to environmental sustainability and human rights, Wells Fargo respects the differing opinions being expressed in this dispute ... We remain committed to our obligations to serve our customers’ financial needs, and will continue to be respectful of the concerns being expressed by Tribal governments and communities, other groups, and individuals.” (Wells Fargo shoots down Indigenous People’s Policy at shareholder meeting, will continue funding DAPL, 2017)

Konstruksi *Dakota Access Pipeline* (DAPL), meski melenceng dari rencana awal untuk rampung pada awal Januari 2017 pada akhirnya dapat menyelesaikan seluruh tahap pembangunan pada 14 Mei 2017 (Renshaw, 2017). DAPL kemudian mulai beroperasi secara komersil sejak tanggal 1 Juni 2017 (The Associated Press, 2017).

Dukungan penuh dari pemerintah, sokongan dana dari rejim ekonomi global serta kinerja dari korporasi pada akhirnya berhasil mensukseskan pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL). Jaminan keamanan pipa, adanya kebutuhan untuk melakukan independensi energi domestik, pemerataan distribusi energi, biaya energi yang lebih murah, suntikan pendapatan bagi ekonomi Amerika Serikat, keberhasilan pembangunan pipa pada era sebelumnya, serta penyerapan tenaga kerja konstruksi, pemandai besi, dan keamanan menjadi *driving machine* dalam pembangunan proyek tersebut.

Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana kolaborasi hegemoni yang dimiliki negara, korporasi, dan rejim ekonomi global memiliki dampak yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan proses pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL) di Amerika Serikat.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk hegemoni negara, korporasi serta rejim ekonomi global dalam pembangunan proyek *Dakota Access Pipeline* (DAPL) di Amerika Serikat?

C. Landasan Teori

Konsep Hegemoni, Antonio Gramsci

Antonio Gramsci merupakan seorang pemikir “kiri”, filsuf, dan teoritis politik yang menjadi sosok paling berpengaruh pada abad ke 20. Menjabat sebagai ketua Partai Komunis di Italia, Gramsci disebut telah memisahkan diri dari pemikiran Marxisme ortodoks karena mengemukakan tesis baru: hegemoni, dan menentang gagasan kaum Marxis bahwa ekonomi dan mode produksi merupakan satu-satunya elemen

penting yang menentukan sejarah, atau yang kerap disebut sebagai materialisme historis. Karyanya mengenai hegemoni dianggap mampu menjelaskan nihilnya revolusi kaum proletar terhadap sistem kapitalisme, revolusi yang oleh kaum Marxis terdahulu telah diramalkan sebagai sebuah keniscayaan.

Tradisi Marxis pada dasarnya menyatakan bahwa sejarah dikendalikan oleh aspek ekonomi. Manusia, sebut kaum Marxist kiri, bukanlah agen yang menentukan sejarah karena pada dasarnya kesadaran atau cara berpikir seseorang ditentukan oleh kehidupan; lingkungan disekitarnya, dan bukan kehidupan yang ditentukan oleh kesadaran. Sejarah menjadi tidak lebih dari sekadar “perjuangan kelas”; pertarungan antarkelas untuk merebut mode produksi sebagai roda ekonomi karena kelas yang mampu menguasai mode produksi akan mampu menguasai sejarah. Karenanya, sejarah suatu kelompok tidak lebih dari sesuatu yang datang dan kemudian pergi dengan digantikan kelompok yang lain. Argumen ini juga digunakan oleh kaum Marxis untuk menganalisis bakal kejatuhan Kapitalisme dan kebangkitan sosialisme sebagai gantinya (Sugiono, 2006).

Dalam sistem kapitalisme, sebut kaum Marxis, terdapat kontradiksi inheren dalam mode produksi, yakni terjadinya overproduksi, meningkatnya penumpukan modal, serta proletarisasi progresif. Adanya kontradiksi yang semakin memburuk tersebut, menurut ramalan kaum Marxis, akan menimbulkan kebangkitan kaum proletar untuk melawan kelompok penguasa. Marxisme ortodoks meyakini bahwa respon berupa perlawanan dari kaum proletar merupakan sebuah keniscayaan, sehingga perkembangan kapitalisme pada akhirnya akan membangkitkan sosialisme. Keyakinan kaum Marxis pada “kekuatan produktif” sebagai satu-satunya motif kekuasaan sejarah membuat mereka memisahkan elemen-elemen suprastruktur seperti politik, kebudayaan dan ideologi dari elemen sub-struktur, yaitu mode ekonomi produksi. Mereka juga berteguh bahwa elemen suprastruktur hanyalah

secondary effect belaka dari apa yang dikondisikan oleh elemen substruktur (Sugiono, 2006).

Namun demikian ramalan kaum Marxis ortodoks tentang kejatuhan kapitalisme dan kebangkitan sosialisme ternyata meleset saat hantaman krisis ekonomi pada dekade '30-an terjadi tanpa mengakibatkan keruntuhan sistem kapitalis. Revolusi kaum proletar untuk merebut mode produksi sebagai titik balik kebangkitan sosialisme samasekali tidak terjadi. Sebaliknya, standar kelas kehidupan kelas pekerja justru semakin membaik dengan ekspansi ekonomi kapitalis sehingga prospek revolusi nampak seperti sebuah utopia. Atas hal tersebut Gramsci berargumen bahwa manusia bukanlah aktor pasif dan “tunduk” pada sejarah seperti yang dikemukakan oleh kelompok Marxisme ortodoks, melainkan agen aktif yang memiliki kehendak (Sugiono, 2006).

Teori hegemoni Gramsci sendiri lahir dalam rangka menjelaskan kegagalan revolusi kaum sosialis terhadap kapitalisme meskipun terdapat kontradiksi-kontradiksi dalam sistem masyarakat kapitalis. Berlawanan dengan tesis kelompok Marxisme ortodoks yang berpendapat bahwa ekonomi dan mode produksi merupakan satu-satunya motif kekuasaan dalam sejarah, Gramsci berpendapat bahwa aspek material saja tidak cukup dalam sebuah kontrol sosial politik. Lebih dari itu, terdapat aspek lain seperti ide dan *worldview* yang disebarkan kelompok penguasa kepada kelompok yang dikuasai untuk melanggengkan kekuasaannya. Dalam pandangan Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Hal inilah yang disebut Gramsci sebagai hegemoni; menguasai dengan kepemimpinan moral dan intelektual (Sugiono, 2006).

Berkebalikan dengan kelompok Marxis kiri, Gramsci berargumen bahwa elemen suprastruktur bukan hanya

secondary effect dari substruktur ekonomi dan mode produksi. Politik, budaya, dan ideologi menurutnya justru merupakan elemen penting yang menghasilkan kohesi dalam sebuah tatanan masyarakat. Penyerapan nilai, norma, dan kultur penguasa oleh yang dikuasai menyebabkan *worldview* penguasa menjadi sesuatu yang dapat diterima, dan oleh karena itu kepentingan penguasa juga menjadi kepentingan umum; mendapat konsensus dari yang dikuasai sehingga terdapat stabilitas politik dan sosial. Penekanan Gramsci pada ranah suprastruktur inilah yang membedakannya dari golongan Marxis terdahulu.

Untuk kepentingan analisis, Gramsci membagi elemen suprastuktur ke dalam dua level utama yakni masyarakat sipil dan masyarakat politik. Masyarakat sipil dalam konsepsi Gramsci meliputi elemen-elemen swasta seperti universitas, sekolah, media massa, gereja, dan kelompok maupun organisasi kemasyarakatan. Elemen masyarakat sipil memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk kesadaran massa. Oleh karena itu, ujar Gramsci, untuk melanggengkan kontrol sosial-politiknya terhadap yang dikuasai, kelompok penguasa harus memiliki kontrol atas elemen-elemen swasta tersebut. Sebaliknya, masyarakat politik meliputi semua institusi publik yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan “perintah”, seperti tentara, pengadilan, birokrasi, dan pemerintah. Kedua level ini tidak dapat dipisahkan dimana pada satu sisi berkaitan dengan fungsi hegemoni dan di sisi lain berkaitan dengan dominasi langsung yang kemudian membentuk apa yang disebut Gramsci sebagai “negara integral”. Dalam rumusannya negara terdiri dari dua elemen tersebut, yakni [Negara = masyarakat politik + masyarakat sipil] atau bahwa hegemoni dilindungi baju besi koersi. Dengan demikian, kelompok penguasa tidak hanya menjalankan fungsi dominasi mereka sebagai kelompok yang secara legal berkuasa, tetapi juga hegemoni, yakni konsensus berupa persetujuan dari yang dikuasai atas kepemimpinan mereka (Sugiono, 2006).

Pemerintahan hegemonik, lanjut Gramsci, mensyaratkan sentralitas konsensus masyarakat daripada penggunaan elemen koersif. Semakin banyak digunakannya elemen-elemen penekan, maka semakin kecil kemungkinan hegemoni untuk muncul dalam suatu tatanan masyarakat. Karenanya elemen penekan merupakan pilihan terakhir saat apa yang disebut Gramsci sebagai “kesadaran spontan” menemui kegagalan. Dalam *Selections from the Prison Notebook*, Gramsci membedakan dua bentuk kesadaran, yang pertama yakni kesadaran dalam aksi praktikal yang menghubungkan individu dengan realitas dunia, dan yang kedua adalah kesadaran yang bersifat dangkal; diwariskan dan diserap oleh seorang individu tanpa dipertanyakan yang mempengaruhi sikap moral. Kesadaran ini kemudian disebut sebagai kesadaran spontan (Lears, 1985). Hegemoni bukan merupakan sesuatu yang diraih melalui paksaan, melainkan upaya-upaya politis, kultural dan intelektual guna menciptakan *worldview* bersama bagi seluruh masyarakat (Sugiono, 2006).

Dalam pandangan Gramsci, hal tersebut menjelaskan mengapa suatu kelompok penguasa harus memperjuangkan legitimasi kekuasaannya dari massa. Oleh karenanya kelompok penguasa harus mampu membuat yang dikuasai juga merasa memiliki norma atau nilai yang mereka anut. Saat *worldview* dari kelompok penguasa diterima oleh massa, maka publik akan turut menjustifikasi kepentingan penguasa sebagai kepentingan mereka sehingga tindakan kelompok hegemonik merupakan ‘kemaslahatan’ bagi masyarakat keseluruhan (Sugiono, 2006).

Konsep hegemoni Gramsci juga melibatkan apa yang ia sebut sebagai “blok historis”: aliansi dari berbagai kekuatan sosial (kelas-kelas) berbeda yang disatukan secara politis oleh perangkat ide-ide hegemonik (Sugiono, 2006). Blok historis memiliki hubungan timbal balik antara wilayah aktivitas politik, etik, maupun ideologis dengan wilayah ekonomi. Sedang tanggung jawab untuk membangun dan memproduksi hegemoni diemban oleh “intelektual organik”: intelektual yang

aktivitasnya diarahkan untuk menyebarkan ideologi dalam politik maupun ekonomi sehingga tercipta *worldview* yang koheren guna menciptakan hegemoni sosial dan pemerintahan politik. Intelektual organik sendiri hadir dalam setiap kelompok kelas, seperti yang disebutkan Gramsci bahwa setiap kelompok sosial menciptakan bersama dirinya sendiri satu atau lebih strata intelektual yang memberikan homogenitas dan kesadaran fungsinya tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang sosial politik (Sugiono, 2006).

Meski demikian, bukan berarti dalam sebuah masyarakat yang hegemonik samasekali tidak terdapat perlawanan terhadap kelas penguasa. Dalam kasus tertentu terdapat gerakan sosial, protes, bahkan penciptaan *counterhegemony*. Namun gerakan dan aksi tersebut jarang atau hampir tidak pernah menemui kemenangan, karena sekali lagi, kultur penguasa telah terserap oleh massa (Lears, 1985).

Hegemoni merupakan “alat” yang digunakan oleh aktor-aktor *Dakota Access Pipeline* (DAPL) sebagai *the ruling class* dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Aktor-aktor tersebut memiliki supremasi atas masyarakat yang didapatkan melalui suprastruktur yakni ideologi, norma, nilai, dan kultur yang disebarkan oleh intelektual organik yang terdapat pada masing-masing blok historis dalam dua level suprastruktur: masyarakat politik dan masyarakat sipil. *Worldview* dan hegemoni yang diproduksi oleh masyarakat sipil di satu sisi, memiliki “tameng” berupa dominasi dari masyarakat politik di sisi lain. Kompleksitas inilah yang kemudian berhasil mengantarkan proyek DAPL pada realisasinya.

D. Argumentasi Utama

Dengan menggunakan konsep hegemoni milik Antonio Gramsci, penulis berargumen bahwa kelompok penguasa, yakni negara, korporasi, dan rejim ekonomi global menghegemoni masyarakat melalui elemen suprastruktur, yakni ideologi, norma, nilai, dan kultur melalui masyarakat sipil dan masyarakat politik sehingga pembangunan proyek *Dakota Access Pipeline* (DAPL) berhasil dilaksanakan.

E. Tujuan Penelitian

Dengan menggunakan teori hegeoni milik Antonio Gramsci penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hegemoni terbentuk dan bekerja dalam masyarakat; penyebaran nilai dan norma, serta penerimaan *worldview* penguasa oleh massa yang dalam kasus *Dakota Access Pipeline* (DAPL) berdampak pada keberhasilan pembangunan pipa.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian terhadap hegemoni negara, korporasi, dan rejim ekonomi global pada pembangunan *Dakota Access Pipeline* (DAPL) penulis menggunakan batasan jangka waktu yakni dari tahun 2014 hingga 2018.

G. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif untuk bentuk hegemoni negara, korporasi, dan rejim ekonomi global dalam pembangunan proyek *Dakota Access Pipeline* (DAPL).

Pengumpulan data dilakukan dengan analisis data sekunder melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, berita, *report*, juga sumber-sumber lain dari internet.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyusun penelitian ke dalam empat bab dengan topik bahasan masing-masing bab sebagai berikut:

Bab I berisi kronologi kejadian sebagai latar belakang masalah, menghadirkan rumusan masalah, penjelasan landasan teori, mengajukan argummentasi utama, serta menjelaskan tujuan, jangkauan, metode, juga sistematika penulisan dari penelitian.

Bab II berisi *promising aspects* dari pembangunan DAPL dan menyajikan satu per satu aktor dalam pembangunan tersebut bersama upaya yang dilakukan untuk menyukseskan pembangunan proyek DAPL.

Bab III berisi analisis dari upaya-upaya yang dilakukan masing masing aktor pembangunan dengan menggunakan teori hegemoni milik Antonio Gramsci

Bab IV berisi kesimpulan.